

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB)



BPR TANJUNG RAYA

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan regulasi OJK No. 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Koperasi BPR Tanjung Raya tengah merancang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk tahun 2025, yang bertujuan mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam aktivitas perbankan sebagai wujud dukungan terhadap inisiatif Perbankan Hijau.

Komitmen terhadap keuangan berkelanjutan merupakan upaya kolektif dalam sistem jasa keuangan untuk mewujudkan pembangunan berkesinambungan. Strategi ini sangat krusial bagi keberlangsungan institusi, mengingat mengabaikan dimensi lingkungan dan sosial dapat meningkatkan eksposur risiko, khususnya risiko kredit akibat potensi kegagalan pembayaran. Dengan demikian, pembiayaan berkelanjutan secara langsung berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang.

Sebagai lembaga intermediasi, Koperasi BPR Tanjung Raya memiliki tanggung jawab signifikan dalam melestarikan lingkungan. Melalui mekanisme penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit, institusi dituntut untuk selektif dalam pemberian pembiayaan, menghindari aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem. Pendekatan ini mengadopsi prinsip triple bottom line: People, Planet, dan Profit, dengan mengintegrasikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam praktik operasional.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) menjadi dokumen strategis yang akan menjadi panduan komprehensif bagi seluruh personel. Laporan ini merupakan edisi kedua, dengan laporan perdana telah dilaporkan ke OJK pada Desember 2023 melalui platform APOLO RBB.

Untuk periode 2025-2029, Koperasi BPR Tanjung Raya menargetkan pertumbuhan berkelanjutan melalui penguatan sektor UMKM, dengan tetap mempertahankan keseimbangan antara kinerja bisnis dan praktik berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

DAFTAR ISI

SAMPUL LAPORAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF	4
1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	4
1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan	5
1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	5
1.4. Program yang Akan Dilaksanakan Dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	6
1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan	8
1.6. Seluruh Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan	9
BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	10
2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan	10
2.2. Keterlibatan Pihak Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	10
BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	11
3.1. Rencana Strategis Bank	11
3.2. Kapasitas Organisasi	12
3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis	13
3.4. Strategi Komunikasi	14
3.5. Sistem Monitoring	15
3.6. Kebijakan Pemerintah	15
BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	16
4.1. Transformasi Kelembagaan dalam Rangka Mendukung Praktik Keuangan yang Berkelanjutan, meliputi Penataan Struktur Organisasi, Penguatan Mekanisme Manajemen Risiko, Perbaikan Tata Kelola Perusahaan, serta Pembaruan Standar Prosedur Operasional yang Komprehensif	16
BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN	18
5.1. Pegawai, Pejabat, Unit Kerja yang Bertanggung Jawab Terhadap Monitoring dan Evaluasi	18
5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	18
5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	19
5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Tercapai Tujuan yang Diinginkan	19
5.5. Penutup	21

BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Periode transisi menuju implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) akan dimulai pada tahun 2025. Namun, sampai saat ini, informasi komprehensif perihal capaian dan efektivitas penerapan konsep Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2024 masih belum sepenuhnya tersedia untuk dilakukan evaluasi mendalam.

Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Uraian	Tahun 2024 (Nominal Dalam Jutaan Rupiah)	
Produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan		
a. Penghimpunan Dana	Nihil	Nihil
b. Penyaluran Dana	7 Rekening	Rp1.501
Total Aset Produktif Pada Kegiatan Usaha Berkelanjutan		
a. Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Rp1.500	
b. Total Seluruh Kredit/Pembiayaan	Rp20.643	
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank	7,27%	
Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Rp1.500	NPL 0,36%
a. Energi terbarukan	Nihil	NPL Nihil
b. Efisiensi energi	Nihil	NPL Nihil
c. Pencegahan dan pengendalian polusi	Nihil	NPL Nihil
d. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
e. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air	Nihil	NPL Nihil
f. Transportasi ramah lingkungan	Nihil	NPL Nihil
g. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
h. Adaptasi perubahan iklim	Nihil	NPL Nihil
i. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (Eco Efficient)	Nihil	NPL Nihil
j. Bangunan berwawasan lingkungan	Rp306	NPL 0,00%

yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional		
k. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	Nihil	NPL Nihil
l. Kegiatan UMKM	Rp1.194	NPL 0,36%

1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

1.2.1. Visi

Misi strategis kami adalah mengembangkan institusi perbankan yang unggul, dengan fokus pada kualitas pelayanan komprehensif yang selaras dengan prinsip berkelanjutan, meliputi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kepedulian lingkungan.

1.2.2. Misi

1. Mengupayakan implementasi konsep Sustainable Finance yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran komunitas
2. Melakukan penguatan dan pengembangan sumber daya internal perbankan yang selaras dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan
3. Merancang struktur tata kelola yang komprehensif dan memperkuat mekanisme manajemen risiko, dengan fokus khusus pada dimensi sosial dan ekologis

1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Merujuk pada POJK No. 51/POJK.03/2017 yang dikeluarkan pada 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai institusi keuangan memiliki tanggung jawab untuk secara bertahap mengintegrasikan konsep keuangan berkelanjutan. Implementasi ini melibatkan penerapan delapan prinsip utama dalam struktur organisasi, dengan penekanan pada keselarasan antara tiga dimensi kritis: pencapaian ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian ekosistem.
2. Dalam praktiknya, BPR diwajibkan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang merupakan dokumen strategis komprehensif yang merinci rencana operasional jangka pendek dan panjang. Dokumen ini mencakup pendekatan sistematis untuk mewujudkan program kerja dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang cermat.
3. Sesuai regulasi yang berlaku, BPR harus menghasilkan Laporan Keberlanjutan yang menguraikan secara mendetail kinerja dalam aspek ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan dalam kerangka praktik bisnis berkelanjutan.
4. Prosedur ini mengatur mekanisme koordinasi internal BPR secara rinci, termasuk peran kunci dari Direksi, Unit Bisnis, Departemen Sumber Daya Manusia, Unit Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.
5. Untuk mendukung transformasi digital dan implementasi keuangan berkelanjutan, BPR memerlukan Standar Pedoman Operasional yang komprehensif, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan dinamis industri keuangan.

1.4. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1.4.1. Rencana Satu Tahun

No	Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Tujuan Aktivitas	Indikator Pencapaian
1	01 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025	Mengadakan Sosialisasi, Training (inhouse/public course) atau workshop terkait Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) kepada Internal Pegawai	Meningkatkan kompetensi pegawai tentang Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance)	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai dan / atau target training yang telah ditetapkan.
2	01 Feb 2025 s/d 28 Feb 2025	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
3	01 Mar 2025 s/d 31 Mar 2025	Penurunan Penggunaan Listrik (Kwh) dan penghematan air.	Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik dan air sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2024 dan perlunya pemasangan sticker-sticker tentang penghematan penggunaan listrik dan air pada beberapa sudut kantor sebagai upaya untuk meningkatkan awareness pegawai
4	01 Apr 2025 s/d 30 Apr 2025	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja (Unit Bisnis) yang mengelola dan/atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
5	01 Jun 2025 s/d 30 Jun 2025	Melakukan evaluasi dan update kebijakan tentang Keuangan berkelanjutan yang telah disusun.	Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang update dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk	Tersusunnya kebijakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan Keuangan berkelanjutan (Disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisari)

			kebijakan.	
6	01 Jul 2025 s/d 31 Jul 2025	Mengurangi Penggunaan Kertas	Penghematan dan mendukung program go green	Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2024 dan Peningkatan Utilitas e-office/ email.
7	01 Agt 2025 s/d 31 Agt 2025	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.	Penurunan penggunaan air minum kemasan dan Penggunaan Tumblr/ gelas di setiap Rapat dan Pelatihan.
8	01 Okt 2025 s/d 31 Okt 2025	Meningkatkan pertumbuhan kredit kepada usaha-usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 (satu) % dari portofolio KYD UKM tahun sebelumnya.	Memberantas kemiskinan dan kelaparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.	Bertambahnya pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) yang Berwawasan Lingkungan.
9	01 Nov 2025 s/d 30 Nov 2025	Pelaksanaan literasi keuangan dan akuisisi nasabah penyimpan dan debitur yang memiliki usaha masuk kategori berkelanjutan.	Terjalinnya kerjasama yang efektif sehingga pemahaman mengenai Keuangan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.	Pelaksanaan literasi keuangan
10	01 Des 2025 s/d 31 Des 2025	Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkeditan	Mendukung program pemerintah untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk dibuatkannya kebijakan.	Telah dilakukannya penyesuaian kebijakan & prosedur di bidang Perkeditan
11	01 Des 2025 s/d 31 Des 2025	Mengakuisisi DPK (Dana Pihak Ketiga) dari nasabah yang sudah mendukung Program Keuangan Berkelanjutan.	Mendukung pendanaan berwawasan lingkungan	Terdapat DPK dari nasabah berwawasan lingkungan.

1.4.2. Rencana Lima Tahun

No	Tahun	Uraian dan Target Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	2025	Penyelenggaraan sosialisasi tentang	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1

		konsep Keuangan Berkelanjutan Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan.	kali bagi seluruh pegawai.
2	2025	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
3	2025	Efisiensi Penggunaan Listrik Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi	Penghematan biaya listrik sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2024.
4	2025	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
5	2025	Mengurangi Penggunaan Kertas Penghematan dan mendukung program go green	Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2023.
6	2025	Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan	SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris
7	2025	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.	Penurunan penggunaan air minum kemasan
8	2026	Penyempurnaan Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan Memiliki Standar dan Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan yang lebih lengkap	Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris
9	2027	Memiliki Produk Keuangan Berkelanjutan Melakukan kajian-kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan	Telah dilakukan kajian terkait produk pembiayaan usaha daur ulang kertas, plastik dan lainnya
10	2028	Pembelajaran terhadap Debitur Edukasi kepada debitur kategori kegiatan usaha berkelanjutan	Edukasi kepada debitur terkait kategori kegiatan usaha berkelanjutan
11	2029	Pengembangan portofolio implementasi Keuangan Berkelanjutan Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi.	Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi.

1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

Dalam upaya transformasi digital, Koperasi BPR Tanjung Raya berkomitmen untuk menggerakkan sumber daya internal guna mengimplementasikan strategi Penerapan

Keuangan Berkelanjutan secara komprehensif. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi institusi perbankan dalam mendukung praktik keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

1.6. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

1. Unit Kerja RAKB menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan satuan kerja terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Unit Kepatuhan dan Manajemen Risiko berperan penting dalam mengembangkan dan mengawasi kerangka Aksi Keuangan Berkelanjutan di institusi perbankan. Mereka bertanggung jawab untuk merancang panduan internal yang komprehensif, melakukan evaluasi mendalam, serta memberikan masukan strategis terkait pemenuhan standar kepatuhan dalam program tersebut. Selain itu, unit ini secara berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul, termasuk risiko kredit dan risiko potensial lainnya, dalam konteks implementasi inisiatif keuangan berkelanjutan Bank.
3. Unit Kerja Sumber Daya Manusia melaksanakan program peningkatan kompetensi internal untuk mempersiapkan dan mendukung implementasi strategi Keuangan Berkelanjutan di lingkungan organisasi. Kegiatan ini difokuskan pada pemberdayaan dan pelatihan pegawai agar mampu memahami serta mengaplikasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam praktik keuangan.
4. Setiap individu yang tergabung dalam organisasi memikul tanggung jawab penuh untuk mengimplementasikan inisiatif keuangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

BAB II

PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Dalam proses pengembangan strategi keuangan berkelanjutannya, Koperasi BPR Tanjung Raya mendasarkan perencanaan pada sejumlah referensi utama yang menjadi landasan fundamental penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

- a. Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019.
- b. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 – 2025.
- c. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 27 Juli 2017.
- d. Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017.

2.2. Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam proses penyusunan strategi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), Koperasi BPR Tanjung Raya menerapkan pendekatan internal yang komprehensif. Tim Divisi Perencanaan, khususnya Bagian Penyusunan RKA, mengambil inisiatif untuk merancang kerangka kerja tanpa mengandalkan bantuan konsultan eksternal. Metode ini dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya dan keahlian yang telah dimiliki organisasi, dengan melibatkan berbagai unit kerja yang memiliki kompetensi strategis terkait implementasi praktik keuangan berkelanjutan.

1. Pengembangan Produk dan Jasa keuangan berkelanjutan yang melibatkan Divisi Bisnis dan Divisi Operasional
2. Pengembangan Kapasitas Intern yang melibatkan Divisi SDM dan Divisi Umum.
3. Penyesuaian organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur melibatkan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

BAB III

FAKTOR PENENTU

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

3.1. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis bank terkait laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasional bank sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 51/POJK.03/2017. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat dijadikan acuan:

1. Penyusunan Strategi Keberlanjutan

a. Visi dan Misi : Integrasikan visi keberlanjutan ke dalam strategi utama bank, seperti mendukung inklusi keuangan dan pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

b. Komitmen Kepemimpinan : Libatkan manajemen puncak untuk mendorong pelaksanaan kebijakan keberlanjutan di seluruh lini bisnis.

2. Pengembangan Produk dan Jasa Berkelanjutan

a. Pembiayaan Hijau (Green Financing) : Kembangkan produk pembiayaan untuk energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan proyek ramah lingkungan.

b. Tabungan Keberlanjutan : Promosikan produk tabungan yang mendukung inisiatif keberlanjutan, seperti donasi otomatis untuk lingkungan.

c. Peningkatan Inklusi Keuangan : Sasar segmen underserved dengan produk mikro yang mendukung pengembangan masyarakat.

3. Implementasi Tata Kelola Keberlanjutan

a. Kebijakan Internal : Tetapkan kebijakan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dalam proses kredit dan investasi.

b. Pelatihan dan Kapasitas : Tingkatkan pemahaman karyawan tentang aspek keberlanjutan melalui pelatihan.

c. Monitoring Proyek : Bangun sistem untuk memantau dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang didanai.

4. Pelaporan dan Transparansi

Penyusunan Laporan RAKB, Pastikan laporan mencakup :

a. Identifikasi risiko dan peluang keberlanjutan.

b. Strategi operasional untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

c. Indikator keberlanjutan yang terukur, seperti pengurangan emisi karbon atau dampak sosial.

d. Standar Pelaporan : Ikuti standar internasional seperti GRI (Global Reporting Initiative) atau SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

5. Peningkatan Teknologi dan Digitalisasi

- a. Digital Banking : Gunakan teknologi untuk mengurangi jejak karbon operasional, seperti digitalisasi layanan untuk mengurangi penggunaan kertas.
 - b. Sistem Pemantauan Risiko: Gunakan analitik data untuk mengidentifikasi proyek dengan potensi risiko ESG tinggi.
6. Kolaborasi dan Kemitraan
- a. Kemitraan dengan Lembaga Internasional : Kerja sama dengan lembaga seperti IFC atau UNEP untuk mendapatkan panduan dan pendanaan terkait proyek keberlanjutan.
 - b. Kolaborasi Lokal : Gandeng pemerintah daerah atau komunitas untuk implementasi proyek hijau dan inklusi keuangan.
7. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan
- a. Lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja keberlanjutan sesuai indikator yang telah ditetapkan.
 - b. Perbarui rencana aksi sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan pasar, dan kondisi lingkungan.

3.2. Kapasitas Organisasi

3.2.1. Kapasitas Organisasi

Dalam konteks dinamika industri perbankan yang kompetitif, Koperasi BPR Tanjung Raya menyadari pentingnya merekrut sumber daya manusia yang memiliki keahlian tinggi sesuai kompetensi spesifiknya. Perusahaan secara konsisten menerapkan prinsip inklusivitas dengan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh kandidat tanpa membedakan jenis kelamin dalam proses seleksi dan penerimaan pegawai.

Dewan Komisaris Bank

No	Nama	Jabatan
1	ONG TJIE HIN	Komisaris Utama
2	UNANG SULARKO	Komisaris

Direksi Bank

No	Nama	Jabatan
1	FERRY HIDAJAT	Direktur Utama
2	ABANG MUHAMMAD IRWAN	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif / Divisi / Unit / Satuan Kerja

No	Nama	Uraian Divisi / Unit / Satuan Kerja
1	Dian Budiana	Kapala Bagian Operasional
2	Hernowo Prakoso	PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko
3	Dani Murdani Subhi	PE Audit Intern
4	Sofi Yuliana	Kepala Bagian Bisnis

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga- tenaga yang berkompeten pada bidang masing-masing Koperasi BPR Tanjung Raya juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

1. Jumlah Komposisi Karyawan

Jumlah Komposisi Pegawai Bank Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S3)	0
2	Pasca Sarjana (S2)	1
3	Sarjana (S1)	9
4	Sarjana Muda / Diploma	4
5	SMA Atau Sederajat	4
6	SMP Sederajat	0
7	SD Sederajat	0
Total		18

Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	11
2	Perempuan	7
Total		18

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Koperasi BPR Tanjung Raya dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan training– training untuk pegawai baik itu secara offline maupun online agar Koperasi BPR Tanjung Raya dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

3.3.1. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan Bank sesuai pada tabel di bawah ini: faktor-faktor yang mendukung penetapan tujuan dan prioritas Keuangan Berkelanjutan. Faktor-faktor yang disebutkan adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dimiliki ataupun sedang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal BPR bersangkutan. BPR menjelaskan keterkaitan faktor-faktor tersebut dengan upaya BPR dalam merencanakan dan menjalankan program Keuangan Berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa:

1. Rencana strategis bisnis yang telah ada;
2. Kapasitas organisasi yang dimiliki sekarang;
3. Kondisi keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki sekarang;
4. Kerjasama dengan pihak eksternal jika ada;
5. Strategi komunikasi yang ada;
6. Sistem monitoring, evaluasi dan mitigasi yang selama ini dijalankan; dan
7. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu Keuangan Berkelanjutan.

A. Kinerja Keuangan

(Dalam Juta Rupiah)

No	Indikator	2024 (TW III)	2023	2022
1	Total Aset	Rp32.342	Rp35.010	Rp41.478
2	Modal Inti	Rp6.400	Rp6.013	Rp5.747
3	Kredit Yang Diberikan	Rp20.643	Rp27.473	Rp30.644
4	Dana Pihak Ketiga	Rp25.562	Rp27.241	Rp33.999
5	Pendapatan Operasional	Rp3.801	Rp5.464	Rp4.855
6	Beban Operasional	Rp3.531	Rp4.817	Rp4.247
7	Laba Operasional	Rp269	Rp647	Rp608

B. Rasio Keuangan

No	Rasio	2024 (TW III)	2023	2022
1	Rasio KPMM	27,51%	22,55%	19,34%
2	NPL Gross	0,85%	0,95%	0,95%
3	NPL Net	0,75%	0,70%	0,70%
4	ROA	1,04%	1,65%	1,73%
5	NIM	10,84%	10,16%	10,85%
6	Rasio BOPO	92,91%	88,16%	87,47%
7	LDR	80,75%	100,85%	76,58%

3.3.2. Kapasitas Teknis

Peningkatan kapasitas teknis teknologi Bank menjadi perhatian utama antara lain dengan penyediaan aplikasi / software berbasis teknologi digital dan infrastruktur teknologi untuk mendukung aktivitas operasional dan pengembangan bisnis di masa mendatang.

3.4 Strategi Komunikasi

Koperasi BPR Tanjung Raya berupaya menciptakan komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, Koperasi BPR Tanjung Raya terus mengkomunikasikan agar aktivitas operasional untuk lebih mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif di antaranya :

1. Melakukan penghematan energi, air, dan kertas
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan.

3.5 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan evaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini.
2. Rapat yang dilakukan secara berkala untuk memonitor kinerja seluruh unit kerja.

3.6 Kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan RAKB mengacu kepada regulasi dan kebijakan pemerintah.

BAB IV
PRIORITAS DAN URAIAN
RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

4.1. Transformasi Kelembagaan dalam Rangka Mendukung Praktik Keuangan yang Berkelanjutan, meliputi Penataan Struktur Organisasi, Penguatan Mekanisme Manajemen Risiko, Perbaikan Tata Kelola Perusahaan, serta Pembaruan Standar Prosedur Operasional yang Komprehensif.

a. Dasar Pemikiran

Dalam konteks keuangan berkelanjutan, pengembangan struktur organisasi perusahaan merupakan elemen kritis yang mendasari keseluruhan strategi implementasi. Setiap tingkatan organisasi memiliki peran fundamental dalam membangun fondasi keuangan yang berkelanjutan. Komitmen manajemen puncak menjadi katalis utama untuk menggerakkan program-program yang telah dirancang dengan cermat.

Setiap unit organisasi dituntut untuk bertindak secara profesional, selaras dengan visi dan misi perusahaan serta mendukung strategi pencapaian tujuan korporasi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan masukan strategis kepada Direksi, terutama dalam menangani kasus-kasus pelanggaran atau penyimpangan, baik melalui mekanisme pemberian sanksi, perbaikan sistem internal, maupun pengoptimalan prosedur operasional yang ada.

Dengan pendekatan komprehensif ini, organisasi dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan tidak sekadar menjadi konsep teoritis, melainkan praktik nyata yang terimplementasi secara sistematis dan berkelanjutan.

b. Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep Keuangan Berkelanjutan	01 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025	Dana dan sumber daya manusia	Bagian SDM dan Kepatuhan
2	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup	01 Mar 2025 s/d 31 Mar 2025	SDM	Kepatuhan
3	Efisiensi Penggunaan Listrik	01 Apr 2025 s/d 30 Apr 2025	SDM	Bagian Umum
4	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	01 Mei 2025 s/d 31 Mei 2025	SDM	Direksi
5	Mengurangi Penggunaan Kertas	01 Jul 2025 s/d 31 Jul 2025	SDM	Bagian Umum dan Kepatuhan

6	Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan	01 Agt 2025 s/d 31 Agt 2025	SDM	Bagian Kepatuhan
7	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	01 Okt 2025 s/d 31 Okt 2025	SDM	Bagian Kepatuhan

c. Sumber Daya

Untuk merealisasikan rencana tersebut, diperlukan alokasi pendanaan yang bersumber dari kas internal korporasi. Implementasi program akan dikoordinasikan oleh unit organisasi yang bertanggung jawab, dengan melibatkan seluruh komponen struktural secara komprehensif. Dalam proses pelaksanaannya, akan dilakukan konsultasi dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak eksternal, termasuk badan pengawas resmi, auditor independen, dan para ahli konsultan yang berkompeten di bidangnya.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi menyeluruh akan dilaksanakan mengacu pada kriteria dan timeline yang telah dirancang secara detail oleh unit organisasi yang memiliki kewenangan pengawasan. Pendekatan sistematis akan diterapkan dalam mengukur dan menganalisis seluruh parameter yang telah distandarisasikan sebelumnya.

e. Tantangan dan Rencana Kedepan

Di lingkungan perbankan dan keuangan, terdapat sejumlah faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi dinamika industri. Beberapa di antaranya mencakup transformasi regulasi pemerintah yang dinamis, fluktuasi permintaan masyarakat terhadap instrumen keuangan berkelanjutan, serta berbagai tekanan struktural yang terus berkembang dalam ekosistem ekonomi.

BAB V

TINDAK LANJUT

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

5.1. Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi

Dalam konteks Penerapan Keuangan Berkelanjutan, proses pengawasan dan evaluasi memiliki peranan strategis yang sangat fundamental. Kegiatan pemantauan komprehensif dilakukan melalui beberapa mekanisme utama:

Pertama, aktivitas pengawasan dilaksanakan secara sistematis di bawah koordinasi langsung Direktur Kepatuhan. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan akan diulas secara berkala pada penghujung setiap periode kegiatan untuk memastikan keselarasan dan efektivitas program.

Sistem evaluasi yang dikembangkan memiliki tujuan spesifik, yakni:

- Memantau capaian program secara menyeluruh
- Mengidentifikasi potensi permasalahan jangka pendek dan panjang
- Merumuskan tindakan korektif yang diperlukan

Fungsi pemantauan dibagi ke dalam dua jalur utama:

1. Fungsi Kepatuhan: Mengawasi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan dari aspek kepatuhan dan hukum
2. Manajemen Risiko: Melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko terkait lainnya sesuai kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan

Peran strategis Direktur Kepatuhan dan kepala divisi terkait sangatlah krusial dalam menjamin implementasi program berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk menjamin implementasi yang optimal dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, diperlukan mekanisme pengukuran periodik yang memperhatikan beberapa aspek kunci, yakni:

1. Koordinasi menyeluruh antaraseluruh pemangku kepentingan
2. Penetapan standar baku dalam eksekusi program
3. Harmonisasi pemahaman di antara pelaku terkait

Adapun tahapan pengukuran dan pelaporan realisasi rencana aksi meliputi:

1. Pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan rencana keuangan pada tahun berjalan
2. Evaluasi komprehensif atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Pendekatan sistematis ini bertujuan memastikan akurasi, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan inisiatif keuangan berkelanjutan.

Penentuan Waktu Untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan	Bulan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RAK dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait
2	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Akhir November Tahun Berjalan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB
3	Laporan Keberlanjutan	Paling lambat akhir April Tahun berjalan	Divisi perencanaan-Bagian Penyusun RBB/RKA dan RAKB bekerjasama dengan divisi terkait

5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Apabila pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tidak berjalan sesuai dengan proyeksi dan jadwal yang telah ditetapkan, institusi perbankan akan mengambil langkah-langkah strategis berikut:

1. Melakukan optimalisasi berkelanjutan terhadap kapasitas dan aset yang tersedia di lingkungan BPR
 2. Melanjutkan upaya diseminasi informasi terkait inisiatif keuangan berkelanjutan sebagai wujud komitmen BPR dalam mengimplementasikan arahan resmi pemerintah
1. Pelaksanaan dan sosialisasi aksi keuangan berkelanjutan pada tahun berjalan.
 2. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
 3. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya.

5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan

Dalam upaya mengelola potensi ancaman pada implementasi keuangan berkelanjutan, Koperasi BPR Tanjung Raya terlebih dahulu melakukan analisis komprehensif dan identifikasi faktor risiko untuk setiap prioritas strategis. Pendekatan sistematis ini bertujuan menghasilkan strategi penanggulangan risiko yang efektif dan terukur, sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan kerugian atau dampak negatif dalam proses pelaksanaan program keuangan berkelanjutan.

- a. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan.
 1. Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/ atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan konsumen.

2. Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
 3. Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program- program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumberdaya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.
- c. Pengembangan dan penyesuaian Produk dana dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan.
1. Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM, pariwisata, dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka Koperasi BPR Tanjung Raya akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan mobil Kas Keliling yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun.
 2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
 3. Koperasi BPR Tanjung Raya memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan nyaman dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability) dan sistem keamanan (cyber security). Penerapan sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, Koperasi BPR Tanjung Raya akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.
 4. Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, dimana survei merupakan salah satu sarana bagi Koperasi BPR Tanjung Raya dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negative akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja.
 5. Koperasi BPR Tanjung Raya akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.
- d. Penyaluran kredit berbasis lingkungan.
1. Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
 2. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak

positif dari kredit yang disalurkan.

3. Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau.
 4. Menentukan batas penyaluran kredit minimal yang berlaku bagi internal bank mengingat meski aturan sudah dibuat, tetapi kewajiban terkait dengan jumlah penyaluran kredit minimal yang harus disalurkan belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban ekosistem terhadap usaha yang dibiayai bank masih tinggi dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan kurang kuat.
 5. Memberikan insentif kepada debitur yang berada pada kolektibilitas rendah namun secara efektif telah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam proses bisnisnya dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.
- e. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktifitas operasional Bank. Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
- f. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan.
1. Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktifitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi seorang Direksi demi menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.
 2. Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan melibatkan divisi-divisi yang berpotensi terkena risiko.
 3. Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

5.5. Penutup

Dokumen strategi ini menjadi panduan utama bagi pimpinan Koperasi BPR Tanjung Raya dalam mengimplementasikan kerangka kerja dan pendekatan sistematis terkait inisiatif Keuangan Berkelanjutan. Rencana aksi komprehensif ini dimaksudkan untuk memberikan arahan yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan praktik keberlanjutan di lingkup keuangan perusahaan.

**LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN RAKB
(RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN)**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan RAKB Tahun 2025
Koperasi BPR Tanjung Raya**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Demikian Laporan RAKB Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud komitmen Bank dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perbankan yang baik yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan 3P yaitu Profit (Ekonomi), People (Sosial) dan Planet (Lingkungan).

Bandung, 09 Desember 2024

Koperasi BPR Tanjung Raya

Disiapkan oleh



Ferry Hidayat
Direktur Utama



Disetujui oleh



Ong The Hin
Komisaris Utama

Nomor : 097/DIR/BPRTR/XI/2024
Tanggal : 09 Desember 2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada
Pimpinan OJK
Kantor Regional II Jawa Barat
Jl. Ir. H. Juanda No.152 Kel. Lebakgede Kec. Coblong Kota Bandung
Jawa Barat 40132

Referensi:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Perihal : **Penyampaian Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Koperasi BPR Tanjung Raya Tahun 2025**

Mengacu pada referensi tersebut di atas Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini BPR dan BPRS wajib menyusun dan menyampaikan Laporan RAKB ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahunnya pada waktu yang sama dengan penyampaian RBB (Rencana Bisnis Bank) yaitu paling lambat tanggal 15 Desember. Oleh karenanya menunjuk perihal dimaksud, kami menyampaikan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Koperasi BPR Tanjung Raya Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 09 Desember 2024

Koperasi BPR Tanjung Raya

Disiapkan oleh



Ferry Hidajat
Direktur Utama



Abang Muhammad Irwan
Direktur Kepatuhan



BPR TANJUNG RAYA

Bandung, 2 Desember 2024

Nomor : 094/DIR/BPRTR/XII/24

Kepada Yth,
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl. Ir H Juanda No.152
Bandung 40135

Perihal : Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 2025
Koperasi BPR Tanjung Raya

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah sebagaimana diatur POJK No. 8 Tahun 2023 pasal 74, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Rencana Pengkinian Data tahun 2025 Koperasi BPR Tanjung Raya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, terimakasih.

Hormat kami,
Koperasi BPR Tanjung Raya




A.M. Irwan
Direktur Kepatuhan

**LAPORAN RENCANA PENGKINIAN DATA
KOPERASI BPR TANJUNG RAYA
TAHUN 2025**

No	Jenis nasabah dan tingkat risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau strategi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah seluruh CIF			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Nasabah orang perorangan					
	1) Risiko tinggi	0	0%	Identitas KTP, Alamat tempat tinggal, Pekerjaan, Penghasilan	Korespondensi melalui surat, email, telpon	100% sampai akhir tahun
	2) Risiko menengah	1	0.03 %	Identitas KTP, Alamat tempat tinggal, Pekerjaan, Penghasilan	Korespondensi melalui surat, email, telpon	100% sampai akhir tahun
	3) Risiko Rendah	69	1.95 %	Identitas KTP, Alamat tempat tinggal, Pekerjaan, Penghasilan	Korespondensi melalui surat, email, telpon	100% sampai akhir tahun
2	Nasabah korporasi					
	a. Non usaha mikro dan kecil					
	a. Risiko tinggi	0	0			
	b. Risiko menengah	0	0			
	c. Risiko rendah	0	0			
	b. Usaha mikro dan kecil					
	a. Risiko tinggi	0	0			
	b. Risiko menengah	0	0			
	c. Risiko rendah	2	100%	Alamat Usaha, Pengurus dan kepemilikan, Data keuangan	Korespondensi melalui surat, email, telpon	100% sampai akhir tahun
	c. PJK					
	1) Risiko tinggi	0	0			

	2) Risiko menengah	0	0	0				
	3) Risiko rendah	0	0	0				
	d. Yayasan							
	1) Risiko tinggi	0	0	0				
	2) Risiko menengah	0	0	0				
	3) Risiko rendah	0	0	0				
	e. Selain perusahaan dan yayan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)							
	1) Risiko tinggi	0	0	0				
	2) Risiko menengah	0	0	0				
	3) Risiko Rendah	2	100%		Alamat Usaha, Pengurus dan kepemilikan, Data keuangan	Korespondensi melalui surat, email, telpon	100% sampai akhir tahun	
3	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Lembaga Internasional dan perwakilan Negara Asing							
	a. Risiko tinggi	0	0	0				
	b. Risiko menengah	0	0	0				
	c. Risiko rendah	2	100%		Alamat Usaha, Pengurus dan kepemilikan, Data keuangan	Korespondensi melalui surat, email, telpon	100% sampai akhir tahun	
4	<i>Cros Border Correspondent Banking</i>							
	a. Risiko tinggi	0	0	0				
	b. Risiko menengah	0	0	0				
	c. Risiko rendah	0	0	0				